Tata Kelola Sumber Daya Alam Vanili Di Kabupaten Sikka

by Fransiska Merlina Sareng

Submission date: 02-Oct-2024 09:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2472252114

File name: Tata_Kelola_Sumber_Daya_Alam_Vanili_Di_Kabupaten_Sikka.pdf (893.7K)

Word count: 4672

Character count: 30330

Tata Kelola Sumber Daya Alam Vanili Di Kabupaten Sikka

Fransiska Merlina Sareng^{1*}, Laurensius Petrus Sayrani², Rouwland Alberto Benyamin³

¹Prodi Ilmu Politik-Universitas Nusa Cendana, Indonesia ²Prodi Ilmu Politik- Universitas Nusa Cendana, Indonesia ³Prodi Ilmu Politik- Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*merlinsareng@gmail.com1

Alamat: Jl.Matani Raya, Lasiana, Kec. Klp. Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Korespondensi penulis: <u>merlinsareng@gmail.com</u>

Abstract. This study aims to explain the design of vanilla natural resource governance in Sikka Regency, explain the configuration and roles of actors in vanilla natural resource governance in Sikka Regency and explain the implications of vanilla natural resource governance design in Sikka Regency on farmers' welfare. The benefit of this research is as a reference material for the government, entrepreneurs and farmers as actors in vanilla natural resource governance in Sikka Regency in vanilla management. This research uses a qualitative approach with descriptive method with observation, interview and documentation study techniques. The results showed that vanilla governance design in the form of production, distribution and benefits currently implemented in Sikka Regency has not yet obtained optimal results and there are actors who have their respective positions and roles in governance that still need to be coordinated to optimize the benefits of governance. In addition, the design of vanilla governance in Sikka Regency has not been able to improve the welfare of vanilla farmers in Sikka Regency.

Keywords: Governance; Role of Actors; vanilla.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaska 16 esain tata kelola sumber daya alam vanili di Kabupaten Sikka, menjelaskan konfigurasi dan peran ak 9 dalam tata kelola sumber daya alam vanili di Kabupaten Sikka dan menjelaskan implikasi dari desain tata kelola sumber daya alam vanili di kabupaten Sikka terhadap keseja 16 aan petani. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan acuan bagi pemerintah, pengusaha dan petani sebagai aktor dalam tata kelola sumber daya alam vanili di Kabupaten Sikka dalam pengelolaan vanili. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain tata kelola vanili berupa produksi, distribusi dan manfaat yang saat ini dijalankan di Kabupaten Sikka belum mendapatkan hasil yang optimal dan terdapat aktor-aktor yang memiliki posisi dan perannya masingmasing dalam tata kelola yang masih perlu dilakukan koordinasi guna mengoptimalkan manfaat tata kelola. Selain itu, desain tata kelola vanili di kabupaten Sikka belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani vanili di Kabupaten Sikka.

Kata kunci: Tata Kelola; Peran Aktor; Vanili.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya adalah dengan bertani dan berkebun. Hasil perkebunan di Indonesia sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda. Sebagian besar bangsa Eropa berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia adalah karena Indonesia memiliki kekayaan alam yaitu hasil perkebunan yang berlimpah-limpah berupa rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada dan vanili. Vanili dijuluki sebagai emas hijau karena termasuk salah satu rempah termahal di dunia. Indonesia merupakan negara produsen vanili terbesar kedua di dunia setelah Madagaskar dan bahkan pernah menjadi nomor 1 di dunia 2 tahun berturut-turut pada tahun 2011-2012 (FAO, 2019 dalam (Abdat et al., 2022). Di pasar internasional, vanili Indonesia dikenal dengan sebutan Java Vanilla Beans karena kandungan vanilin pada vanili Indonesia memiliki kualitas yang tinggi yaitu 2,75% (Hadisutriano, 2004 dalam (Keo et al., 2023) . Data Base pertanian (2019) menyebutkan bahwa Indonesia mengekspor 260 ton vanili dengan nilai ekspor mencapai US\$ 69.609.679,90. Nilai ekspor vanili Indonesia menduduki urutan ketiga di dunia pada tahun 2019. Tingginya nilai ekspor vanili dapat berkontribusi terhadap perekonomian negara eksportir vanili. Potensi peningkatan ekspor vanili Indonesia ke seluruh dunia sebesar USD 59 juta (ITC Export Potential Map). Harga vanili di pasar global saat ini juga terbilang sangat tinggi dengan rata-rata mencapai EUR 720,40/kg untuk vanili ekstrak dan EUR 175,56/kg untuk vanili utuh pada tahun 2022 (Kemenkeu, 2023). Kabupaten Sikka memiliki lahan vanili seluas 862,62 Ha dengan produksi sebanyak 113,79 ton pada tahun 2022 (Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2021). Berdasarkan data luas areal dan produksi yang ada, menunjukkan bahwa ratarata produktivitas vanili di Kabupaten Sikka adalah sekitar 0,132 ton per hektar.

Dengan luas areal mencapai ratusan hektar dan produksi mencapai ratusan ton, vanili di Kabupaten Sikka bisa menjadi salah satu komoditas unggulan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam tata kelola sumber daya alam. Dalam praktik tata kelola vanili di Kabupaten Sikka, terdapat beberapa permasalahan diantaranya adanya peraturan dari pemerintah yang mengendalikan jadwal penjualan vanili dan para petani membutuhkan surat keterangan dari kepala desa untuk menjual vanili miliknya. Petani vanili juga mengalami kesulitan dengan adanya kasus pencurian yang menyebabkan

kualitas vanili anjlok dan turunnnya harga vanili. Selanjutnya, petani vanili di Kabupaten Sikka tidak memiliki power dalam menentukan harga vanili. Harga vanili di tentukan oleh pengusaha pembeli yanili yaitu UD. Fajar dan PT Tripper dan juga tengkulak. Selain itu, berdasarkan data awal yang penulis terima, para petani vanili belum sejahtera karena belum mampu memenuhi kebutuhan seperti kesehatan dan pendidikan. Tata kelola sumber daya alam mengacu pada aturan, norma dan prinsip yang mendefinisikan pengelolaan sumber daya alam untuk penggunaan ekonomi (Chen et al., 2023 dalam (Raharjo Jati, n.d.). Sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga dapat diekspor. Poin penting dari tata kelola adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan serta menciptakan keseimbangan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Isu utama mengenai pengelolaan sumber daya alam di daerah adalah bagaimana melahirkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian suatu daerah secara optimal (Solihin et al.,2007). Kebijakan tata kelola vanili harus memperhatikan aspek produksi, distribusi dan manfaat yang bisa di peroleh oleh para petani demi kesejahteraan mereka.

KAJIAN TEORITIS

Grima dan Berkes (1989) mendefinisikan sumber daya alam sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Rees (1990) mengatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan senagai sumber daya harus memiliki dua kriteria yaitu yang pertama, harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya yang kedua adalah harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut (Fauzi,2004 dalam Wulandari, 2013). Secara etimologis, pengelolaan berasal dari kata kelola atau to manage yang berarti mengatur, menyelenggarakan atau menjalankan dan mengendalikan suatu pemerintahan, perusahaan, program atau proyek melalui suatu tatanan dan proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan adalah rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian

sumber daya, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sumadi & Ma'ruf, 2020 dalam Hasti, 2023). Tata kelola didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain sektor publik, sektor privat (swasta) dan sektor ketiga yaitu civil society (Hasti, 2023). Mengelola berarti menyelenggarakan atau menjalankan, mengurus dan mengendalikan. Pengelolaan merupakan upaya pengorganisasian sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi (Hasti, 2023).

Thompson (1990) mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (power) dan kepentingan (interest) yang dimiliki oleh aktor tersebut yang kemudian dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu, Aktor dengan Tingkat kepentingan (interest) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (power) yang rendah diklasifikasikan sebagai subyek (subjects). Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus dijaga dengan baik. Aktor dengan tingkat kepentingan (intrest) dan kekuatan (power) yang tinggi di klasifikasikan sebagai pemain kunci (key players). Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru. Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) dan kekuatan (power) yang rendah diklasifikasikan pengikut lain (crowd), untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimilikinya biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Aktor ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi yang baik. Aktor dengan tingkat kepentingan (interset) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (contest setters). Aktor ini dapat mendatangkan risiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor ini dapat berubah menjadi key players karena suatu peristiwa.

Teori Thompson merupakan teori yang ideal untuk membantu mengklasifikasikan aktor dalam perannya di dalam proses tata kelola sumber daya alam vanili di

Kabupaten Sikka. Thompson membagi aktor dalam 4 kelompok dengan melihat masing-masing kekuatan dan kepentingan aktor. Perbedaan kekuatan dan kepentingan kemudian akan berimbas pada peran yang akan dijalankan oleh masing-masing aktor dalam kebijakan tata kelola sumber daya alam vanili.

13 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2007) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung lewat orang lain atau dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) mereduksi data dengan menyederhanakan semua data yang diperoleh, (2) menyajikan data dengan menyajikannya dalam bentuk deskriptif yang kemudian di jabarkan sesuai dengan konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini. penelitian (3) menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Pertama, triangulasi data, mengecek kembali jawaban yang diberikan informan. Kedua, triangulasi sumber, membandingkan data yang diperoleh melalaui wawancara dengan observasi maupun dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Ketiga, triangulasi metode, dilakukan beberapa metode berbeda seperti wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memastikan kondisi sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sikka. Penulis mewawancarai 18 informan yaitu 5 orang kepala desa, antara lain Kepala Desa Wolomotong, Kepala Desa Wolokoli, Kepala Desa Rubit, Kepala Desa Bloro dan Kepala Desa Iligai, 5 orang petani vanili dari masing-masing desa, 2 pengusaha pembeli vanili di Kabupaten Sikka yaitu UD.Fajar dan

PT Tripper Nature, 1 orang tengkulak, 1 orang dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka, 1 orang dari Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 1 orang dari TNI, 1 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja dan 1 orang masyarakat. Selain itu, kegiatan observasi juga dilakukan dengan cara mengamati cara penanaman vanili dan penjualan vanili di Kabupaten Sikka dan foto di lokasi wawancara. Penelitian ini menggunakan konsep tata kelola sumber daya alam untuk melihat bagaimana desain tata kelola sumber daya alam vanili di Kabupaten Sikka mulai dari produksi, distribusi dan manfaatnya. Teori peran aktor Thompson (1990) melihat bagaimana peran aktor dalam desain tata kelola vanili di Kabupaten Sikka.

Desain Tata Kelola Sumber Daya Alam Vanili Di Kabupaten Sikka

Teori tata kelola sumber daya alam dan institusi menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola sumber daya alam yang ada pada suatu daerah, terdapat institusi/lembaga pemerintah yang mengatur akses dan perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, penggunaan teknologi dan pelayanan publik secara transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan partisipasi semua stakeholder terkait dan komunitas lokal. Dalam akses dan perizinan institusi perlu mengatur terkait siapa yang boleh mengakses dan menggunakan sumber daya alam melalui sistem perizinan yang jelas (Muhajir, 2020)

Teori tata kelola sumber daya alam dan institusi berfokus pada beberapa hal diantaranya institusi yang ada, baik institusi formal maupun institusi informal. Institusi formal ini mengatur terkait regulasi dan kebijakan dan institusi informal berkaitan dengan norma, adat istiadat dan kebiasaan. Selain institusi, kepemimpinan dan otoritas juga merupakan salah satu fokus yang perlu diperhatikan dalam tata kelola sumber daya alam dan institusi. Kepemimpinan dan otoritas berkaitan dengan kewenangan institusi dalam menetapkan regulasi dan kebijakan untuk mengatur sumber daya alam. Selanjutnya adalah adanya partisipasi publik dimana dalam penyelenggaraan tata kelola sumber daya alam, terdapat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Kemudian dalam tata kelola sumber daya alam dan institusi juga perlu adanya koordinasi antar lembaga yaitu kerja sama antar berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam tata kelola sumber daya alam vanili di Kabupaten Sikka, institusi formal yang terlibat di dalam tata kelola vanili yaitu pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam hal ini dinas terkait yaitu Dinas Pertanian Dinas Perdagangan dan Kepala desa sebagai pemerintahan lokal. Institusi formal ini terlibat dengan menentukan regulasi dan kebijakan dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka. Kewenangan dalam menentukan regulasi ini mulai dati pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten dan pada tingkat lokal yaitu pemerintah Desa. Dalam tata kelola vanili di kabupaten Sikka, pemerintah menetapkan regulasi seperti Instruksi Bupati Sikka nomor 1/inst/ HK/2019 tentang jual beli vanili pada wilayah Daerah Kabupaten Sikka yang di dalamnya mengatur juga terkait izin penjualan. Regulasi yang mengatur ini kemudian hanya dijalankan dalam kurun waktu satu tahun, menunjukkan bahwa adanya inkonsisten peran institusi dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan perlu dijalankan secara optimal dan berkelanjutan agar tujuan dari tata kelola dapat dirasakan juga secara terus-menerus.

Terkait partisipasi publik yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan serta harus adanya koordinasi antar lembaga yaitu dengan mengadakan kerja sama antar berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam Tata kelola vanili di Kabupaten Sikka sendiri belum melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait vanili regulasi yang perlu ditetapkan akibatnya muncul permasalahan seperti jadwal penjualan dan syarat penjualan yang tidak memperhatikan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Selain itu, kebutuhan masyarakat dalam hal ini dalam penanggulangan masalah hama dan penyakit belum bisa akibat ketidaktersediaan obat, dan kebijakan petugas lapangan yang tidak mencapai masyarakat secara optimal. Terkait koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan pemangku kepentingan juga belum dijalankan secara baik, seperti kerja sama antara pemerintah dan pengusaha pembeli yang belum dilaksanakan serta koordinasi antara pemerintah dan pihak keamanan yang belum dijalankan sehingga keamanan vanili masih menjadi masalah utama dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka.

Selanjutnya, berdasarkan teori ekonomi sumber daya alam, sumber daya bisa saja dialokasikan melalui berbagai pengaturan kelembagaan, perencanaan terpusat dan

melalui mekanisme pasar. Meskipun pengaturan kelembagaan bisa saja menghasilkan alokasi yang efisien, namun hanya mekanisme pasar (*free market*) yang menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal. Dengan kata lain, jika pasar tidak eksis, alokasi sumber daya tidak akan terjadi secara efisien dan optimal. Pasar adalah media yang mengomunikasikan keinginan konsumen dan produsen. Jadi pasar bisa gagal beroperasi jika pasar tersebut tidak bisa mengomunikasikan keinginan konsumen secara tepat (Fauzi, 2004)

Dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka, tidak adanya kerja sama dan regulasi yang mengatur terkait mekanisme pasar, dimana harga dan jalur distribusi sepenuhnya diserahkan dan dibiarkan berkembang sendiri pada mekanisme pasar, menunjukkan bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap efisiensi pasar. Mekanisme pasar juga perlu mendapat perhatian agar pasar tetap eksis dan alokasi vanili bisa dilaksanakan secara efisien dan optimal.

Berdasarkan teori dan temuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa desain tata kelola vanili di Kabupaten Sikka belum optimal baik dari segi keterlibatan lembaga formal melalui regulasi yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan tata kelola vanili. Kebijakan yang dilaksanakan belum konsisten sehingga masih ada permasalahan dalam desain tata kelola yang ada. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dan penetapan regulasi juga belum dijalankan secara baik, sehingga regulasi yang ada masih menimbulkan permasalahan lain di masyarakat. Koordinasi antar lembaga juga masih sangat kurang seperti koordinasi antara dinas terkait dengan aparat keamanan, serta koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini petani vanili. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka yaitu pemerintah daerah, UD. Fajar, PT Tripper Nature dan pengepul serta petani juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola vanili.

Konfigurasi Dan Peran Aktor

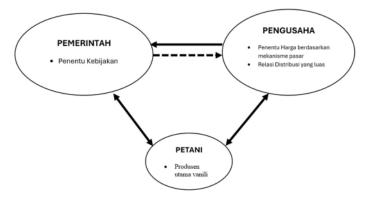
Konfigurasi dan peran aktor melihat bagaimana kedudukan aktor dan bagaimana kontribusi setiap aktor berdasarkan kedudukannya dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka.

Thompson (1990) mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (power) dan kepentingan (interest) yang dimiliki oleh aktor tersebut yang kemudian di kategorikan menjadi 4 jenis yaitu: (1) Aktor dengan Tingkat kepentingan (interest) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (power) yang rendah diklasifikasikan sebagai subyek (subjects). (2) Aktor dengan tingkat kepentingan (intrest) dan kekuatan (power) yang tinggi di klasifikasikan sebagai pemain kunci (key players). (2) Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) dan kekuatan (power) yang rendah diklasifikasikan pengikut lain (crowd). (3) Aktor dengan tingkat kepentingan (interset) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (contest setters)... Aktor ini dapat berubah menjadi key players karena suatu peristiwa. Kekuatan dan kepentingan aktor dapat dilihat dari posisi atau kedudukan dan kontribusi aktor tersebut di dalam tata kelola vanili.

Pemerintah daerah Kabupaten Sikka dengan kedudukan untuk menentukan regulasi memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Setiap kebijakan yang ditetapkan harus memberikan dukungan kepada petani agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama petani kecil yang bergantung pada tanaman vanili ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki kepentingan dalam menciptakan praktek pertanian vanili yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sikka berkontribusi dalam menetapkan regulasi berupa instruksi bupati Sikka nomor 1/inst/ HK/ 2019 Tentang Jual Beli Vanili Pada Wilayah Daerah Kabupaten Sikka. Instruksi ini kemudian mengatur terkait waktu pemanenan vanili dan jadwal penjualan serta tata cara penjualan yang perlu menggunakan surat keterangan dari pemerintah desa. Regulasi ini kemudian mengatur semua elemen yang terlibat dalam dinamika vanili termasuk petani dan pengusaha. Dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki kepentingan (interset) yang besar namun juga memiliki kekuatan (power) yang besar pula.

UD. Fajar, PT Tripper Nature dan pengepul dalam kedudukannya sebagai penentu harga dengan mempertimbangkan mekanisme pasar memiliki kepentingan dalam memperoleh keuntungan secara optimal dan memastikan stabilitas bisnis mereka. Dengan membangun jaringan distribusi yang efisien dan mempelajari mekanisme pasar dan menentukan harga yang tepat, UD. Fajar, PT Tripper Nature dan pengepul dapat menutupi

biaya produksi, operasional dan distribusi sambil memperoleh margin keuntungan yang layak. Selain itu, pengusaha juga memiliki kepentingan dalam memperoleh vanili berkualitas baik demi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Seperti pada UD. Fajar yang membutuhkan yanili dengan kualitas baik untuk disuplay ke perusahaan di Bali dan pengepul yang berusaha memenuhi kebutuhan perusahaan atas permintaan vanili dengan kualitas yang diinginkan. Pemenuhan keinginan perusahaan dapat memperpanjang kerja sama perusahaan dan rantai distribusi yang terus terjaga. Pengusaha memiliki kekuatan yang tinggi karena dapat mempengaruhi harga pasar dan memiliki sumber daya yang besar serta jaringan penjualan yang luas. Oleh karena itu, pengusaha memiliki kepentingan (interset) yang besar dan juga kekuatan (power) yang besar. Berikutnya, kedudukan petani sebagai produsen vanili memiliki kepentingan dalam kesejahteraan ekonomi dan stabilitas harga yang dapat meningkatkan kualitas hidup seperti pemenuhan kebutuhan dan mendukung kehidupan keluarga. Petani juga membutuhkan mekanisme pasar yang adil dan menguntungkan untuk membantu mereka menghadapi fluktuasi pasar. Perlunya menciptakan tata kelola vanili yang berkelanjutan sehingga memperkuat posisi petani dalam rantai pasok global. Petani memiliki kekuatan yang rendah karena tidak dapat menentukan harga vanili dan tidak memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan pasar. Oleh karena itu, petani memiliki kepentingan (interest) yang tinggi tapi kekuatan (power) yang rendah. Relasi antar aktor dalam tata kelola sumber daya alam vanili di kabupaten sikka, di gambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 1. Peta Relasi Antar Aktor Dalam Tata Kelola Vanili Di Kabupaten Sikka

Sumber: Olahan peneliti, 2024

Gambar 1. di atas menunjukkan relasi antar aktor dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka. Besaran bola menggambarkan besaran pengaruh yang dimiliki oleh aktor yang bersangkutan. Dari diagram dapat dilihat bahwa Pemerintah dan Pengusaha berada dalam bola dengan besar yang sama, yang menunjukkan bahwa pemerintah dan pengusaha memiliki pengaruh dan kekuatan yang sama besar dalam tata kelola vanili di kabupaten Sikka.

Pemerintah dengan pengaruhnya yang besar karena memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan mampu mempengaruhi petani dan pengusaha seperti pada kebijakan tata cara penjualan vanili di Kabupaten Sikka yaitu instruksi bupati nomor I/inst/HK/2019 tentang Jual beli vanili pada wilayah daerah Kabupaten Sikka. Tanda panah yang terputus pada diagram antara hubungan pemerintah dan pengusaha menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak cukup kuat dalam mempengaruhi pasar dalam hal ini pengusaha dikarenakan penetapan harga jual vanili ditentukan berdasarkan mekanisme pasar global dan fluktuasi ketersediaan vanili di perusahaan yang membeli vanili di petani. Kebijakan itu juga kemudian menyebabkan para pengusaha menjadi tidak bebas dalam melakukan kegiatan jual beli. Hal ini menujukan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatur tata kelola vanili belum mampu mengatur hingga penentuan harga vanili di pasaran.

Pengusaha dalam kekuatannya menentukan harga berdasarkan mekanisme pasar dan relasi distibusi yang kuat kemudian mampu mempengaruhi penentuan harga yang selanjutnya berdampak pada pendapatan masyarakat dan kehidupan serta pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama yang harus dicapai oleh pemerintah. Pengaruh yang dimiliki oleh pengusaha ini kemudian mempengaruhi pemerintah terutama dalam tata kelola vanili dengan memberikan kebebasan bagi pengusaha dalam melaksanakan kegiatan distribusi vanili dengan melihat mekanisme pasar dan tren industri vanili saat ini yang dipahami oleh para pengusaha.

Pengusaha dengan kekuatannya kemudian mempengaruhi pendapatan petani. Harga vanili yang dibeli oleh para pengusaha menunjukkan kualitas vanili yang dihasilkan oleh petani vanili. Petani yang tidak memiliki relasi yang kuat dalam jalur ditribusi vanili kemudian mengikuti saja harga vanili yang ditetapkan oleh pembeli. Dalam relasi kekuasaan, petani sebagai produsen utama vanili dapat memiliki pengaruh yang besar karena menjadi satu-satunya sumber bahan baku utama vanili yang dibutuhkan oleh konsumen. Namun, produksi yang tidak optimal dalam hal ini terkait kualitas dan kuantitas kemudian kekuatan dalam akses pasar yang rendah kemudian menyebabkan petani memiliki pengaruh dan kekuatan yang kecil dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka.

Kekuatan yang besar dari pemerintah dan pengusaha kemudian mempengaruhi petani. Bagi petani, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki pengaruh dalam penetapan jadwal penjualan dan syarat penjualan yang memerlukan surat keterangan dari kepala desa setempat. Jadwal penjualan yang ditetapkan mendukung keamanan vanili, namun kemudian berpengaruh terhadap keperluan dan kebutuhan petani saat itu yang terdesak untuk segera menjual karena kebutuhan mereka.

Implikasi Desain Tata Kelola

Tingginya nilai jual vanili akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani yang semakin banyak membudidayakan vanili (Mansyur, 2023). Membudidayakan vanili bisa menjadi jalan peningkatan ekonomi lokal. Banyak petani kecil dan komunitas bergantung pada komoditas ini sebagai sumber penghasilan utama mereka. Dengan memanen vanili berkualitas, petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka (Mansyur, 2023).

Fluktuasi pendapatan dan ketidakpastian produksi berdampak pada pendapatan petani yang kemudian juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Stabilitas harga vanili sangat mempengaruhi pendapatan petani. Penetapan kebijakan harga minimum merupakan salah satu solusi yang bisa diberikan guna membantu petani dalam menghadapi fluktuasi pasar sehingga bisa mendapatkan harga yang layak bagi vanili mereka. Selain itu, memastikan terwujudnya mekanisme pasar yang adil juga merupakan salah satu cara yang perlu untuk meningkatkan pendapatan dan stabilitas pendapatan petani. Akses ke pasar merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya harga jual vanili. Biaya

ongkos kirim menjadi salah satu pertimbangan para pengusaha dalam menentukan harga selain pada mekanisme pasar global.

Petani yang memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan dan kesehatan dengan berbagai tanaman perdagangan dan tidak berfokus pada satu tanaman saja menunjukkan bahwa adanya adaptabilitas dan diversifikasi oleh petani dalam praktik pertanian mereka. Diversifikasi dibutuhkan agar petani bisa tetap memenuhi segala kebutuhan mereka, terutama dalam kondisi harga vanili yang terus mengalami fluktuasi yang tajam dan terus menyebabkan ketidakpastian pendapatan bagi petani. Selain itu, ketidakpastian pendapatan ini menunjukkan bahwa tata kelola vanili di Kabupaten Sikka perlu dioptimalkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka, ternyata menghasilkan sebuah pola relasi antar aktor dimana terdapat aktor yang mendominasi dan ada aktor yang terdominasi. Aktor yang mendominasi adalah pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menentukan regulasi dan kebijakan yang dapat mengikat dan mengendalikan aktor-aktor lain. Selain itu, terdapat aktor lain yang juga mendominasi yaitu pengusaha. Dengan memiliki kekuatan dalam melihat tren serta perkembangan pasar dan juga memiliki jaringan pasar yang luas, pengusaha bisa mendominasi tata kelola vanili di Kabupaten Sikka sebagai pembeli yang menentukan harga dengan melihat perkembangan dan mekanisme pasar. Petani sendiri berada dalam posisi terdominasi karena tidak memiliki kekuatan untuk menentukan regulasi ataupun menentukan harga vanili mereka.

Dalam desain tata kelola vanili di Kabupaten Sikka, kegiatan produksi desain tata kelola vanili di Kabupaten Sikka belum optimal baik dari segi keterlibatan lembaga formal melalui regulasi yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan tata kelola vanili. Kebijakan yang dilaksanakan belum konsisten sehingga masih ada permasalahan dalam desain tata kelola yang ada. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dan penetapan regulasi juga belum dijalankan secara baik, sehingga regulasi yang ada masih menimbulkan permasalahan lain di masyarakat. Koordinasi antar lembaga juga masih sangat kurang seperti koordinasi antara dinas

terkait dengan aparat keamanan, serta koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini petani vanili. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka yaitu pemerintah daerah, UD. Fajar, PT Tripper Nature dan pengepul serta petani juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola vanili.

Berdasarkan teori peran aktor Thompson (1999), dalam tata kelola vanili di Kabupaten Sikka, petani memiliki kepentingan (interest) yang tinggi dalam kedudukannya sebagai produsen utama vanili dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup tetapi memiliki kekuatan (power) yang rendah karena tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga pasar dan kebijakan pasar sehingga diklasifikasikan sebagai subyek (subjects). Pengusaha memiliki kepentingan (interest) yang tinggi dalam kedudukannya sebagai penentu harga dengan mempertimbangkan mekanisme pasar dalam memperoleh keuntungan secara optimal dan memastikan stabilitas bisnis mereka serta memiliki kekuatan (power) yang tinggi karena dapat mempengaruhi harga pasar dan memiliki sumber daya yang besar serta jaringan penjualan yang luas sehingga diklasifikasikan sebagai pemain kunci (key players). Pemerintah memiliki kepentingan yang tinggi yaitu mengendalikan tata kelola dan meningkatkan ekonomi lokal dan memiliki kekuatan yang tinggi karena dapat membuat kebijakan yang mengikat. Oleh karena itu, pemerintah di klasifikasikan sebagai pemain kunci (key players).

Implikasi desain tata kelola dirasakan oleh petani vanili dilihat dari tingkat pendapatan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendapatan petani vanili masih rendah dan terus mengalami fluktuasi sehingga tidak stabil. Pendapatan petani tergantung pada hasil panen dan keadaan pasar global saat itu. Dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, petani vanili di Kabupaten Sikka belum bisa karena pendapatan vanili yang tidak stabil dan tidak menjadi fokus utama petani di sana.

Untuk petani vanili Kabupaten Sikka disarankan agar petani selalu menjaga kualitas vanili dengan menjual saat vanili sudah cukup umur dan melakukan komunikasi aktif terhadap akses informasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian melalui petugas lapangan yang disediakan terkait masalah dalam kegiatan budidaya vanili. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Sikka disarankan bahwa Pemerintah perlu

mengoptimalkan kegiatan produksi vanili masyarakat terutama dalam penyediaan benih unggul dan tata cara penanaman serta edukasi terkait hama dan penyakit terhadap petani agar meningkatkan hasil produksi. Selain itu, pemerintah perlu melakukan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pengusaha pembeli vanili agar petani bisa difasilitasi dalam penentuan harga yang transparan dan adil serta efisien di pasar global demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan petani. Perlu adanya sosialisasi aktif terkait kebijakan terbaru kepada masyarakat agar apa yang menjadi tujuan kebijakan ini dapat sampai kepada masyarakat secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Abdat, H. S., Santoso, S. I., & Nurfadillah, S. (2022). Daya Saing Komoditas Vanili Indonesia di Pasar Internasional. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 6(3), 1084. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.03.28
- Keo, V., Dyanasari, D., & Mutiara, F. (2023). Analisis Prospek Peningkatan Produksi Vanili (Vanilla Planifolia) di Indonesia.
- Raharjo Jati, W. (n.d.). Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik
- Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. (2016). Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati). Journal of Public Policy and Management Review, 5(4), 17-32.
- Hidayat, endik. 2021. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang". *Soetomo Communication And Humanities*.1,126-136.
- Jamaludin, J., & Ranchiano, M. G. (2021). Pertumbuhan tanaman vanili (Vanilla planifolia) dalam polybag pada beberapa kombinasi media tanam dan frekuensi penyiraman menggunakan teknologi irigasi tetes. *Jurnal Agro Industri Perkebunan*, 65-72.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Oetjoe, Samuel V. Ratoe. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang. Universitas Nusa Cendana.

Buku Teks

- Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). Statistik Perkebunan Non Unggulan Nasional 2020-2022.
- Siahaan, Verdianand Robertua. 2020. Politik lingkungan Indonesia (teori dan studi kasus). Jakarta. Universitas Kristen Indonesia.

Sumber dari internet tanpa nama penulis



Tata Kelola Sumber Daya Alam Vanili Di Kabupaten Sikka

ORIGINALITY REPORT					
2 SIMILA	1 % ARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS	
PRIMAR	Y SOURCES				
1	reposito	ory.ub.ac.id		5%	
2	eprints2 Internet Sour	undip.ac.id		2%	
3	pdfs.ser	nanticscholar.or	g	2%	
4	eprints.	undip.ac.id		1 %	
5	digilibac Internet Sour	lmin.unismuh.a	c.id	1 %	
6	id.123do			1 %	
7	VOXNTT.C			1 %	
8	publikas Internet Sour	si.unitri.ac.id		1 %	
9	Tantang	ad Shohibuddin an Undang-und Demokratisasi Ta	ang Desa dala	ım	

Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis", MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 2016

Publication

10	www.suaratani.com Internet Source	1 %
11	econusa.id Internet Source	1 %
12	ngedobos.blogspot.com Internet Source	1 %
13	e-journal.unmuhkupang.ac.id Internet Source	1 %
14	www.scribd.com Internet Source	1 %
15	ejurnal.undana.ac.id Internet Source	1 %
16	www.forestdigest.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On Exclude bibliography On

Exclude matches

< 1%